

# Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Surabaya

Vol 2 Issue 2  
(Oktober, 2020)

Alferdo Satya Kurniawan<sup>1</sup>, Ravita Dyah Ayu Margareta<sup>2</sup>,  
Muhammad Kamil<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas  
Muhammadiyah Malang

Email: Kalferdo1@gmail.com<sup>1</sup>, ravitadyah8@gmail.com<sup>2\*</sup>,  
kamil@umm.ac.id<sup>3</sup>

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received: xxx

Revised version received: xxx

Accepted: xxx

Available online: xxx

### Keywords:

Implementation; Kotaku  
Program; Slum Areas;

### How to Cite:

APA Style 7th

## ABSTRACT

Slum settlements are a problem that hinders the development of urban settlements in Indonesia. Therefore, the Director General of Human Settlements of the Ministry of Public Works and Public Housing issued a policy related to the implementation of the Slumless City Program for big cities in Indonesia. Surabaya City Government responded to the central government policy in handling slum environments in big cities including the City of Surabaya by issuing Mayor Decree No.118.45 / 143 / 436.1.2 / 2015 concerning Priority Areas for Improving the Quality of Housing and Settlements in the City of Surabaya. The main objective of this program is to increase access to infrastructure as well as basic services in urban slum neighborhoods and prevent the emergence of new slum settlements in order to support the realization of habitable, productive and sustainable urban settlements with three patterns, namely restoration, renovation and settlement. back. This research uses qualitative research using a literature study approach with the aim of analyzing the implementation of the My City Program in the City of Surabaya.

Available online at <https://studentjournal.umpo.ac.id/index.php/IJGCS>  
Copyright (c) 2018 by IJGCS



## 1. Pembahasan

Pesatnya pertumbuhan penduduk merupakan akibat adanya urbanisasi, ini lah yang kemudian menjadi satu alasan mengapa lingkungan kumuh marak diperkotaan, karena belum adanya keseimbangan ekonomi pada penduduk yang berpindah dari desa ke kota sehingga memanfaatkan area sekitar sungai maupun di bawah jembatan dengan kata lain bahwa kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan hunian serta sarana dan prasarana yang tidak memadai, selain faktor dari urbanisasi ada juga faktor dari laju penduduk asli kota tersebut. Kemudian karena hal tersebut muncul persoalan tentang permukiman kumuh dimana permukiman tersebut tidak layak huni karena ketidak teraturan pada bangunan, jumlah penduduk dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan syarat (Muta'ali & Nugroho, n.d.).

Penelitian sebelumnya yang berjudul Integrasi Algoritma Lacunarity Dan Analisis Penajaman Citra Worldview 3 Untuk Penentuan Prioritas Dan Jenis Tindak Penanganan Kawasan Kumuh (Kasus Di Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya) oleh Kuncoro PW, dkk dengan temuan pembentukan kawasan kumuh dibutuhkan pemahaman lebih dari masing-masing kawasan

tersebut. Hal dikarenakan setiap permasalahan memiliki berbagai karakteristik. Penanganan dari area permukiman kumuh tidak hanya melibatkan pemulihan fisik sarana/prasarana, tetapi juga terkait dengan standar hidup, gaya hidup dan budaya masyarakat di daerah tersebut.

Menindak lanjuti adanya pemukiman kumuh tersebut maka disusun program Kota Tanpa Kumuh atau KOTAKU oleh Dirjen Cipta Karya PUPR, maka Kota Surabaya menerapkan program tersebut dengan didukung oleh SK Walikota No.118.45/143/436.1.2/2015 tentang Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kota Surabaya yang di terapkan di 26 Kelurahan dengan luas 145,89 Ha. Setelah diterbitkannya SK Walikota pada tahun 2015, kemudian disusul dengan adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Rumah Kumuh dan Pemukiman kumuh untuk kemudian dijadikan sebagai rambu rambu pembenahan lingkungan yang yang masuk dalam prioritas program KOTAKU. Dalam pelaksanaan program ini berada dibawah Organisasi Perangkat Daerah-Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) melalui Satuan Kerja Pengembangan Infrastruktur Pemukiman (PIP) untuk menjalankan program tersebut.

Implementasi menjadi hal yang dinamis karena dalam tahap ini kebijakan yang telah ditetapkan akan dijalankan sesuai dengan tujuan awal, maka dapat dilihat bagaimana sinergi seluruh pihak yang terlibat agar program KOTAKU selain itu dapat dilihat bagaimana proses pelaksanaan program KOTAKU di Kota Surabaya karena dari data yang di keluarkan oleh Kementrian PUPR yang tercantum di dalam Nota Dinas Nomor 02/ND/Cb16/Satker1/2020 perihal Capaian Yang Pengurangan Kumuh Kota Surabaya seluas 145,89 Ha berhasil ditekan hingga 0,3 % pada tahun 2019. Untuk itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai implementasi program KOTAKU yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surabaya dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah Kota Surabaya dalam menganggapi Program KOTAKU serta penerapan program KOTAKU di Surabaya dan juga keunggulan apa yang ditawarkan dari adanya Program KOTAKU yang merupakan program dari Kementrian PUPR.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Dalam penelitian ini memakai metode mengumpulkan data yang berasal dari sumber-sumber tertulis dalam mendukung penelitian implementasi program kotaku di Kota Surabaya. Fokus dari penelitian kepustakaan ini mengacu kepada bermacam teori, hukum, atau gagasan untuk menganalisis dalam memecahkan pertanyaan peneliti yang terumuskan. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan filosofis yang mengacu pada berbagai penyusunan dan penalaran suatu data secara sistematis berdasarkan sudut pandang tertentu, yang dimaksud adalah sudut pandang yang digunakan pada penelitian terdahulu.

Kemudian data yang didapat dianalisis menggunakan teknik analisa data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis anotasi bibliography yang merupakan suatu kesimpulan sederhana dari sebuah buku, artikel, jurnal, dan berbagai sumber tertulis lainnya Selain itu juga menggunakan analisis metode reduksi data (*data reduction*) mereduksi data ialah merangkum, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas lebih bisa dipahami dan juga mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan dari data berikutnya jika masih diperlukan. Selain itu juga menggunakan analisis.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Kebijakan Progam Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Surabaya

Pertumbuhan dari penduduk terjadi secara pesat. Hal itu dikarenakan tingginya tingkat urbanisasi yang berdampak pada ancaman bagi lingkungan dengan meluasnya pemukiman yang menyebabkan timbul lingkungan kumuh yang ada di perkotaan. Hal ini terjadi di Kota Surabaya,

permasalahan di Kawasan perumahan dan permukiman, yaitu masih terdapat banyak daerah dengan kondisi lingkungan, kualitas dan juga kelayakan bangunan dari pada tempat tinggal rumah dan fasilitas sarana juga prasarana yang kurang memadai. Diantara lain sarana yang kurang memadai seperti jalanan, ketersediaan dari sanitasi lingkungan seperti mandi cuci kakus (MCK), IPAL Komunal, sampah, dan juga yang terpenting sistem drainase lingkungan di daerah Kota Surabaya yang perlu ditingkatkan.

Dasar yang harus kita ketahui yaitu melalui peraturan mengenai pencegahan dan juga peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan juga permukiman kumuh yaitu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14/PRT/M/2018. Sebagaimana yang menjadi permasalahan permukiman kumuh dapat kita temui penjelasan dari penetapan Kota Surabaya dalam rangka penanganan lingkungan kumuh. Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 110/KPTS/DC 2016. Dijelaskan pada peraturan tersebut bahwa Kota Surabaya termasuk dalam daerah dengan tujuan dari penerapan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang mana hal tersebut melalui *National Slum Upgrading Program* atau (NSUP) yang penerapan dari program tersebut terdiri atas 8 kecamatan dan juga 12 desa atau kelurahan yang ada di Kota Surabaya.

Kota Surabaya terpilih sebagai salah satu prioritas dari program Kotaku di dalam Provinsi Jawa Timur yang sebagaimana sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur. Implementasi dari program Kotaku sendiri mencerminkan mengenai sebuah konsep pencegahan dan juga peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan juga permukiman kumuh di Kota Surabaya. Maka muncul dua point yaitu pencegahan dan juga peningkatan atas kualitas. Keberadaan dari peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 tahun 2018 yaitu pada Tanggal 12 September 2018 tentang Pencegahan dan juga Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang mana memang menjadi upaya Bersama yang diharapkan dapat mempercepat proses dari pembenahan Kawasan dan juga permukiman dari kota yang masih kumuh dan juga belum tertata.

Langkah yang konkretnya yang sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPKTR) Kota Surabaya dengan menjalankan fungsi sebagai penggerak program. Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sendiri dengan melalui satuan kerja Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP) Kota Surabaya sangat berkomitmen akan kemajuan daerah kumuh tersebut agar menjadi daerah yang asri. Penanganan dari daerah kumuh di Kota Surabaya dilaksanakan pada skala lingkungan, di daerah kelurahan dan desa, dengan melalui penanganan pada tujuh indikator diantaranya seperti keteraturan bangunan, kondisi dari drainase, masalah sampah, air layak minum, akses jalan, akses dari sanitasi, dan juga proteksi dari kebakaran. Penanganan dari lingkungan kumuh dengan sinergi antar stakeholder tersebut diharapkan tidak hanya menuntaskan daerah kumuh, tetapi juga dapat mengatasi parameter kumuh yang lainnya yang mana terjadi pada lingkungan yang lain, sehingga dapat muncul perubahan pada wajah lingkungan tersebut. Semisal secara indikator kumuh tersebut dapat menyelesaikan masalah pada akses jalan atau juga permasalahan mengenai banjir.

### **Penerapan Program KOTAKU**

Tujuan dari adanya Program Kota Tanpa Kumuh yang kemudian lebih akrab dengan sebutan KOTAKU merupakan program dengan tujuan untuk peningkatan akses terhadap infrastruktur dan juga pelayanan dasar di lingkungan permukiman kumuh yang berda diperkotaan serta mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif serta berkelanjutan dengan tetap melibatkan masyarakat selain itu desa ataupun kelurahan yang masuk dalam program KOTAKU difasilitasi dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) serta karang taruna yang ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program KOTAKU. Disisi lain masyarakatpun menyepakati untuk menaati pertaturan bersama dan ada Kelompok Pemanfaatan dan pemeliharaan (KPP) untuk tetap

menjaga lingkungan yang telah diperbaiki tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut maka upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur pemukiman baik skala lingkungan ataupun kawasan.
- 2) Penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah.
- 3) Pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan (*Velibood*) masyarakat.

Sedangkan dalam proses penanganan pemukiman kumuh dalam Program KOTAKU didasarkan atas kualitas pemukiman itu sendiri yang kemudian didasarkan atas tiga pola penanganan :

- 1) Pencegahan  
Tindakan pencegahan lingkungan kumuh baru ini dilakukan dengan cara melakukan pengawasan, pengendalian dan juga pemberdayaan masyarakat. Pengawasan itu sendiri dilakukan sesuai dengan tahapan perizinan (misal; ketentuan perundang undangan ) sedangkan untuk pemberdayaan dilakukan kepada pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan pemukiman kumuh melalui pendampingan dan juga layanan informasi
- 2) Peningkatan Kualitas  
Peningkatan ini dapat dilakukan melalui pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali yang tentunya dilihat berdasarkan pengeloaan lingkungan dan juga dampak sossial yang ditimbulkan dalam bebrapa perbedaan peningkatan tersebut.
- 3) Pengelolaan  
Pengelolaan ini memiliki tujuan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas dari pemukiman dan juga perumahan secara berkelanjutan, kemudian pengelolanyapun dilakukan oleh masyarakat itu sendiri secara swadaya namun fasilitas yangdibutuhkan disediakan oleh pemerintah baik dari segi pendanaan untuk pemeliharaan maupun penguatan dari segi kapasitas masyarakat guna melaksanakan pengelolaan tersebut serta pengelolaan tersebut pemerintah daerah menggunakan berbagai sumber pendanaan.

Sesuai dengan hal tersebut maka Kota Surabaya telah membagi kedalam skala prioritas yang di muat dalam SK Walikota No.118.45/143/436.1.2/2015 tentang Kawasan Prioritas Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kota Surabaya, sebagai berikut

**PRIORITAS 1**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	Wonokromo	Sawunggaling
2.	Bulak	Kenjeran
3.	Bulak	Kedung Cowek
4.	Bulak	Sukolilo Baru
5.	Kenjeran	Bulak Banteng
6.	Rungkut	Rangcut Kidul
7.	Rungkut	Kalirungkut
8.	Semampir	Wonokusumo
9.	Semampir	Sidotopo

**PRIORITAS 2**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	Gubeng	Airlangga
2.	Mulyorejo	Kalisari
3.	Pakal	Benowo
4.	Simokerto	Tambakrejo
5.	Sukomanuggal	Putat Gede
6.	Tenggilis Mejoyo	Kutisari
7.	Krebengan	Morokrebengan

**PRIORITAS 3**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	Asemrowo	Asemrowo
2.	Bubutan	Bubutan
3.	Bubutan	Gundih
4.	Bulak	Kenjeran
5.	Gumung Anyar	Gumung Anyar Tambak
6.	Semampir	Sidotopo
7.	Tandes	Tandes
8.	Wonokromo	Darmo
9.	Krebengan	Dupak
10.	Tandes	Karangpoh

Sumber : SK Walikota No.118.45/143/436.1.2/2015

Dari ketiga tabel tersebut Pemerintah Kota Surabaya memetakan prioritas penanganan dalam melaksanakan Program Kotaku yang pada tahun 2019 berhasil ditekan hingga 0 persen dari jumlah lahan yang masuk dalam program KOTAKU seluas 145,89 Ha karena Program Kotaku merupakan penanganan pemukiman kumuh dengan mendukung gerakan 100-0-100 yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen pemukiman kumuh dan 100 persen akses sanitasi layak. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mengambil salah satu kawasan yang menjadi prioritas dari Program KOTAKU yang ada dilaksanakan di Kota Surabaya tepatnya di daerah Kenjeran dengan penataan kawasan, perbaikan sarana maupun prasarana dasar, perbaikan jalan lingkungan, saluran air, perbaikan mandi cuci kakus (mck), persoalan terkait sampah dan pengamanan kebakaran selain perbaikan secara fisik pemerintah juga memberikan pelatihan kepada masyarakat terkait pengelolaan ikan serta memberi bantuan berupa peralatan untuk para nelayan yang ada di Kenjeran selain itu dana yang dipergunakan adalah hasil dari kerjasama dengan CSR untuk perbaikan fasilitas.

Disisi lain dari adanya keberhasilan Program KOTAKU aspek anggaran menjadi permasalahan meskipun telah dilakukan perkiraan anggaran untuk menjalankan Program Kotaku di Kawasan Kenjeran yaitu melalui dana APBN yang berasal dari pusat dan juga APBD yang berasal dari daerah dan yang telah ditentukan dari RPJM sehingga untuk mengatasi kelanjutan dari Program KOTAKU diperlukan bantuan dari provinsi serta CSR. Kurangnya dana tersebut tidak membuat program tersebut mandek melainkan dengan tetap melakukan pengembangan masyarakat melalui UMKM yang bergerak pada pengelolaan hasil ikan laut dengan berpusat pada Sentral Ikan Bulak (SIB) yang ada di Kenjeran. Selain itu pengembangan lain juga dilakukan dikawasan pantai seperti adanya tempat wisata yaitu Kampung Pelangi dengan dipenuhinya sarana prasarana yang di butuhkan serta rumah rumah warga yang di cat secara keseluruhan dengan tujuan lain selain menangani lingkungan kumuh tetapi juga menjadi destinasi wisata yang di harapkan mampu untuk meningkatkan kualitas hidup yang layak untuk para nelayan.

### **Keunggulan Program KOTAKU**

Program KOTAKU ini membawa perubahan diwilayah Kota Surabaya tentang lingkungan, tidak hanya lingkungan saja melainkan masyarakat juga turut merasakan perubahan dari adanya program ini. Selain itu program ini hadir sebagai suatu upaya pemerintah dalam penanganan lingkungan kumuh yang terjadi di kota kota besar salah satunya adalah Surabaya, dengan memanfaatkan sumber daya manusia, maksudnya adalah mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan program akan membuat masyarakat bisa berpartisipasi dan nantinya mampu mempertahankan ataupun terus memperbaiki fasilitas fasilitas yang telah dibuat maupun diperbaiki, karena bagaimanapun juga masyarakat yang akan merasakan program yang telah dibuat oleh pemerintah tersebut. Selain itu penyerapan kebijakan dari pemerintah pusat diserap dengan baik oleh Pemerintah Kota Surabaya karena dengan konsistem menjalankan program ini hingga program ini dinyatakan tuntas oleh Kementrian PUPR. Tentunya Pemerintah Kota Surabaya menjalankan komunikasi dan komitmen dengan baik hingga program ini mampu diselesaikan selain itu faktor lain yang mendasari adalah kepemimpinan serta sosialisasi yang terus di upayakan agar masyarakat paham tentang program yang dijalankan dengan begitu maka setiap elemen yang terkait dengan program ini paham dan mengurangi kesalah pahamn dalam penerimaan informasi. Disisi lain setelah terlaksananya program ini adalah tidak ada lagi lingkungan kumuh baru di setiap perkotaan yang ada di Indonesia sehingga pemerintah harus terus memantau setelah program itu dilaksanakan agar tidak terbengkalai. Meskipun kurangnya dana masih menjadi persoalan dalam hal ini tetapi perawatan dari fasilitas yang dibangun juga penting hal ini diperlukan agar fasilitas tersebut tidak menjadi usang dan terbengkalai.

#### 4. Kesimpulan

Pelaksanaan Program KOTAKU di Kota Surabaya merupakan upaya pemerintah dalam menangani pertumbuhan pemukiman kumuh di perkotaan dengan tujuan untuk memperbaiki fasilitas dasar sehingga masyarakat dapat mempergunakan hal tersebut sebagai penunjang serta sebagai upaya pemerintah untuk pemberdayaan melalui UMKM agar mampu untuk menjaga kestabilan perekonomian dari masyarakat yang masuk kedalam prioritas KOTAKU di Kota Surabaya, namun disisi lain setiap program yang terlaksana perlu langkah lanjut yaitu pembertahankan dengan cara tetap merawat seluruh fasilitas yang ada menjadi hal utama setelah program ini rampung digrap oleh pemerintah Kota Surabaya serta memastikan bahwa pemukiman kumuh baru tidak tumbuh dilingkungan perkotaan. Program ini juga merupakan upaya pemerintah dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat dengan cara memperbaiki lingkungan serta pelatihan UMKM meskipun setiap daerah berbeda dalam pelaksanaannya karena disesuaikan dengan kebutuhan daerah ataupun lingkungan tersebut.

#### Acknowledgment

Terimakasih kepada Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang yang telah mendukung pengerjaan artikel ini hingga selesai.

#### References

- Andini, I. (2013). Perilaku Perawatan Kehamilan Dan Pertolongan Persalinan Pada Perempuan Kawasan Adat Ammatoa Kabupaten Bulukumba Tahun 2015. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1(1), 36–47. <http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/6.IKE.A.KMP.V1.N1.Jan-April.2013.pdf>
- Arum, I. A., & Meirinawati. (2018). Manajemen strategi dalam menanggulangi permasalahan permukiman kumuh melalui program KOTAKU (kota tanpa kumuh) di kawasan Kenjeran oleh badan perencanaan pembangunan Kota Surabaya. *Publika*, 6(6), 1–7. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/23496>
- Kawasan, S. (2019). *Penanganan permukiman kumuh skala kawasan*. 25–27.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh*. September.
- Nurjiansyah, W. D., Program, M., Ilmu, S., Negara, A., & Airlangga, U. (2016). Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) di Kota Surabaya Wisko Dwi Nurjiansyah. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4, 255–263.
- Pratiwi, N. N., & Puryanti, V. Dampak Program Kota Tanpa Kumuh Terhadap Aspek Ekonomi Masyarakat Di Kota Pontianak (Studi Kasus Kecamatan Pontianak Selatan). *Jurnal Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Tanjungpura*, 7(2).
- Rachma, I. N., & Widowati, N. (2020). Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tugu Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 211-230

- Wasisa, K. P., Hidayati, I. N., Heru, S., & Bs, M. (2015). *Integrasi Algoritma Lacunarity Dan Analisis Penajaman Citra Worldview 3 Untuk Penentuan Prioritas Dan Jenis Tindak Penanganan Kawasan Kumuh (Kasus di Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya ) Integrasi Algoritma Lacunarity Dan Analisis Penajaman Citra WorldV*. 1–17.
- Widyastuty, A. A., & Ramadhan, M. E. (2019, August). Upaya Penataan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Kasus Kelurahan Morokrembangan Kota Surabaya). In *Seminar Nasional Pembangunan Wilayah dan Kota Berkelanjutan* (Vol. 1, No. 1).
- Yustika, F. N., & Umilia, E. (2020). Identifikasi Faktor Penyebab Terjadinya Permukiman Kumuh di Kelurahan Kalisari Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, 8(2), C189–C193.
- Zethary, R. E., & Purnaweni, H. (2019). Implementasi Program Kotaku dalam Revitalisasi Daerah Kumuh di Kelurahan Rejomulyo Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(4), 224-238.